

MODAL SOSIAL MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA PANTAI MUARAREJA INDAH DI KELURAHAN MUARAREJA KECAMATAN TEGAL BARAT KOTA TEGAL

Firda Dwi Anjani

Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, Jalan Ir. H. Djuanda 367 Bandung, firdaanjani1@gmail.com

Aribowo

Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, Jalan Ir. H. Djuanda 367 Bandung, aribowo_stks@yahoo.co.id

Ade Subarkah

Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, Jalan Ir. H. Djuanda 367 Bandung,
ade_subarkah@poltekesos.ac.id

Abstract

Social capital is a community asset that in its utilization can provide economic gain and social benefit. The research aims to know the description of: 1) Informant characteristics, 2) mutual trust in the management of tourism, 3) network or community networks in the management of tourism, as well as 4) values or norms that help the community in the management of tourism. The method used in this research is a qualitative method with a descriptive approach. The informant in this study consisted of 6 people with different social status namely local people, village government, and tourism conscious group members (pokdarwis). The data collection techniques used in this study were in-depth interviews, moderate participatory obesity and documentation studies. Data validity checks are used through observation and triangulation diligence. Data analysis techniques are done by means of data reduction, data presentation, and withdrawal of conclusions. The results of the research shows that people's social capital in tourism management is described as weak, both in social capital bonding, especially there is no knowledge exchange and information between the community and bridging social capital especially the network between the community and the stakeholders that are still running sporadic. Based on the results of the research, researchers proposed the program "Optimization of Bridging Social Capital through the PEPEK Program (Strengthening, Exchange of Knowledge and Sustainability) in the Management of Muarareja Indah Beach Tourism in Muarareja Village, Tegal Barat District, Tegal City".

Keywords:

Social Capital; Trust; Networks; Norms; Management of Tourism

Abstrak

Modal Sosial merupakan aset masyarakat yang dalam pemanfaatannya dapat memberikan keuntungan ekonomi (*economic gain*) dan manfaat sosial (*social benefit*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tentang: 1) Karakteristik informan, 2) Rasa saling percaya (*trust*) masyarakat dalam pengelolaan pariwisata, 3) Jaringan atau jejaring masyarakat dalam pengelolaan pariwisata, serta 4) Nilai atau norma yang melembaga bagi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 6 orang masyarakat dengan status sosial yang berbeda yaitu masyarakat setempat, pemerintah kelurahan, dan anggota kelompok sadar wisata (pokdarwis). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, obeservasi partisipatif moderat dan studi dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data digunakan melalui ketekunan pengamatan dan triangulasi. Teknik analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan modal sosial masyarakat dalam pengelolaan pariwisata digambarkan lemah, baik pada *bonding social capital* khususnya belum ada pertukaran pengetahuan dan informasi antara masyarakatnya maupun pada *bridging social capital* khususnya jejaring antara masyarakat dan *stakeholder* yang masih berjalan sporadis. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti mengusulkan program "Optimalisasi *Bridging Social Capital* melalui Program PEPEK (Penguatan, Pertukaran Pengetahuan, dan Keberlanjutan) dalam Pengelolaan Pariwisata Pantai Muarareja Indah di Kelurahan Muarareja Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal".

Kata Kunci:

Modal Sosial; Rasa Saling Percaya; Jaringan atau Jejaring; Nilai atau Norma; Pengelolaan Pariwisata

PENDAHULUAN

Jalesveva Jayamahe menjadi motto seluruh bangsa Indonesia dalam rangka meningkatkan peran dan ambisi untuk mengembalikan kejayaan maritim Indonesia. Klaim tersebut memiliki landasan, mengingat Indonesia merupakan negara dengan luas wilayah laut sebesar 2,7 km² atau sekitar 70 persen dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Luasnya wilayah laut Indonesia berbanding lurus dengan besarnya potensi yang dimiliki, peneliti dari Pusat Penelitian Oseanografi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2O LIPI) Puji Rahmadi, memaparkan bahwa nilai kekayaan laut Indonesia mencapai Rp. 1.772 triliun atau setara dengan 93 persen dari total APBN Indonesia pada tahun 2018. Nilai kekayaan itu salah satunya bersumber dari potensi wisata bahari.

Keseriusan pemerintah untuk dapat mengelola dan menjaga wilayah perairan Laut Indonesia diwujudkan dalam lima pilar utama cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia, dimana pada pilar ketiga salah satunya berisi komitmen mendorong pariwisata maritim atau pariwisata bahari berbasis masyarakat lokal dalam rangka peningkatan dan pengembangan masyarakatnya. Hal tersebut selaras dengan prinsip pengelolaan pariwisata yang dicanangkan *World Bank* berupa *Community Based Tourism* atau pengelolaan pariwisata yang dari, oleh, dan untuk masyarakat.

Prinsip pokok CBT menurut Sunaryo (dalam Ahmad dan M. Kholid, 2016) diantaranya mengikutsertakan anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta adanya kepastian masyarakat lokal menerima manfaat dari kegiatan kepariwisataan. Mathieson dan Wall (dalam Ahmad dan M. Kholid, 2016) menyatakan

bahwa ada tiga aspek yang mendasari pariwisata berbasis masyarakat yang berwawasan lingkungan yaitu terdiri atas aspek lingkungan, aspek ekonomi, dan aspek sosial budaya.

Pantai Muarareja Indah yang terletak di Kelurahan Muarareja Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal secara tidak langsung menerapkan prinsip CBT dalam pengelolaannya yang ditunjukkan dengan diterapkannya aspek lingkungan berupa kawasan pantai yang dijadikan tempat kegiatan konservasi mangrove, kemudian aspek ekonomi berupa keterlibatan masyarakat setempat menjadi pramuwisata, maupun aspek sosial budaya berupa diperkuatnya identitas masyarakat dengan tetap dilaksanakannya tradisi *nyadran* yang dikemas menjadi atraksi wisata.

Francis dan Woodcock (dalam Wustari, 2015) menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan oleh suatu kelompok atau masyarakat tidak akan terlepas dari yang namanya hambatan (*blockages*), salah satu yang dialami adalah pelatihan yang kurang (*Poor Training*) karena jejaring antar masyarakat yang ada belum menciptakan fungsi pertukaran pengetahuan, serta jejaring dengan *stakeholder* masih berjalan sporadis, padahal terdapat keselarasan pandangan antar keduanya yang diwujudkan dengan adanya keselarasan kebutuhan masyarakat dengan rencana program *stakeholder*.

Berdasarkan hal tersebut dalam kondisi ideal seyogyanya hambatan kurangnya pelatihan tidak terjadi, oleh karena itu peneliti ingin mengeksplorasi bentuk dan kondisi jejaring yang terjalin antara sesama masyarakat maupun dengan *stakeholder* dalam rangka pengelolaan pariwisata. Kemudian peneliti bermaksud meneliti keberadaan, bentuk, serta kondisi rasa saling percaya dan nilai dalam jejaring tersebut, mengingat konsep Putnam (2000) yang mengatakan bahwa suatu jejaring

tetap ada karena adanya rasa saling percaya antar anggotanya yang diikat oleh nilai yang saling menghargai, sehingga peneliti menggunakan konsep modal sosial sebagai fokus dalam penelitian ini.

Konsep modal sosial pada setiap tokoh yang merumuskan berbeda-beda karena didasarkan pada kondisi masyarakat di masing-masing tokoh tersebut. Seperti halnya pandangan modal sosial menurut Putnam (2000) menyatakan bahwa memandang modal sosial dari fenomena menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah (*public distrust*) yang kemudian diikuti bukan hanya partisipasi politik yang melemah namun keanggotaan pada organisasi-organisasi sukarela (*voluntary organizations*) semakin menurun.

Padahal Putnam percaya bahwa asosiasi sukarela bukan hanya efektif menyalurkan informasi, tetapi juga ajang berinteraksi dan melakukan transaksi antar aktor-aktor yang terhimpun di dalamnya. Kemudian dirinya mengacu pada pendapat Bourdieu dan Coleman bahwa interaksi tersebut yang akhirnya disebut sebagai jejaring sosial dapat menjadi upaya mengembangkan modal sosial, di sinilah Putnam mulai menaruh perhatian pada modal sosial.

Beberapa ahli yang mengusulkan konsep modal sosial mengatakan bahwa modal sosial merupakan aset masyarakat yang diperoleh karena adanya relasi yang terjalin. Termasuk di dalamnya Putnam (dalam Sunyoto Usman, 2018) menyatakan bahwa modal sosial melekat dalam relasi sosial dan dibangun melalui jejaring sosial. Kemudian didukung dengan adanya tiga komponen yang terendap di dalamnya yaitu rasa saling percaya (*trust*), jaringan atau jejaring (*networks*), dan nilai atau norma (*norms*).

1. Rasa Saling Percaya (*Trust*)

Menurut Rudy Rapang (2013) mengatakan bahwa kata *Trust* jika diterjemahkan dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia memiliki makna sebagai kata benda dan kata kerja. Makna kata benda *trust* adalah kepercayaan (bersifat tunggal), sementara makna kata kerja adalah proses mempercayai sesuatu (bersifat saling/ada interaksi), karena modal sosial merupakan aset relasi sosial, maka makna *trust* dalam penelitian ini adalah rasa saling percaya.

James Coleman (dalam Sunyoto Usman, 2018) menyatakan bahwa tindakan kerjasama merupakan wujud melanggengkan *trust* yang muncul karena adanya kesamaan pandangan dan keinginan untuk terlibat. Artinya *trust* dalam suatu hubungan tumbuh karena adanya kesamaan pandangan, dapat berwujud adanya kesamaan tujuan untuk mencapai sesuatu yang kemudian memunculkan keinginan untuk melakukannya secara bersama-sama, ditunjukkan dalam bentuk keterlibatan baik terlibat secara waktu, dana, tenaga, pemikiran maupun suara (keputusan).

Selanjutnya Fukuyama (2002) menyatakan bahwa bentuk rasa saling percaya (*trust*) untuk melanggengkan jejaring adalah adanya perilaku jujur. Kemudian peneliti mengasumsikan bahwa untuk meneliti perilaku jujur salah satunya adalah adanya keterbukaan antar anggota yang terlibat dalam suatu hubungan, diantara contohnya adalah transparansi dana.

Oleh karena itu, peneliti melakukan eksplorasi *trust* berkaitan dengan pandangan antar masyarakat maupun dengan *stakeholder* tentang konsep pariwisata untuk pengelolaan pantainya, bentuk keterlibatan pengelolaannya seperti apa, serta keberadaan perilaku jujur atau keterbukaan.

2. Jejaring atau Jaringan (*Networks*)

Lawang (2005) menyatakan bahwa jaringan atau jejaring adalah sumber pengetahuan yang menjadi dasar utama dalam pertumbuhan kepercayaan, artinya melalui jaringan orang saling tahu, saling menginformasikan, saling mengingatkan, saling bantu dalam melaksanakan atau mengatasi suatu masalah.

Sejalan dengan itu, Putnam (2000) menyatakan bahwa suatu jejaring dikatakan efektif apabila di dalamnya ada pertukaran pengetahuan dan hubungan yang saling menguntungkan (*timbal balik/reciprocal relationship*). Kemudian Nan Lin (dalam Sunyoto Usman, 2018) menyatakan bahwa suatu jejaring dikatakan berdaya apabila mampu memfasilitasi masyarakat memperoleh keuntungan ekonomi dan manfaat sosial dari pihak di luar masyarakatnya atau disebut sebagai pemaksimalan peran *bridging social capital*.

Oleh karena itu, peneliti melakukan eksplorasi *networks* berkaitan dengan terlaksananya fungsi jejaring yang efektif yaitu ada atau tidaknya pertukaran pengetahuan antar masyarakat maupun dengan *stakeholder*, bentuk hubungan timbal balik yang ada, serta bentuk dan kondisi terlaksananya pemanfaatan *bridging social capital*.

3. Nilai atau Norma (*Norms*)

Putnam (dalam Rusydan Fathy, 2019) menyatakan bahwa nilai-nilai terkandung di dalam suatu jaringan sosial, artinya posisi nilai-nilai menjadi penting sebagai pengikat atau perekat untuk kohesivitas atau pemersatu hubungan.

Schwartz (dalam Lawang, 2005) menyatakan bahwa terdapat empat nilai yang melekat pada modal sosial yaitu pertama *universalism* yakni nilai tentang pemahaman terhadap orang lain, apresiasi, toleransi serta

proteksi terhadap manusia dan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Artinya nilai yang disepakati antara pihak yang terlibat, kemudian disebut nilai kerjasama.

Kemudian *benevolence* yakni nilai tentang pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan orang lain. Artinya nilai yang bertujuan untuk mensejahterakan pihak lain sehingga memunculkan keyakinan melanggengkan hubungan, atau disebut nilai keyaikinan.

Ketiga, *Tradition* yakni nilai yang mengandung penghargaan, komitmen dan penerimaan terhadap tradisi dan gagasan budaya tradisional. Artinya nilai yang menjadi pedoman dalam berperilaku.

Keempat *Comformity* artinya nilai yang mengandung keselamatan, kehormatan, kestabilan masyarakat dalam berhubungan dengan orang lain dan memperlakukan diri. Kemudian nilai ini akhirnya disebut nilai kerjasama.

Oleh karena itu, peneliti melakukan eksplorasi *norms* berkaitan dengan bentuk dan kondisi nilai sebagai pedoman berperilaku, nilai kerjasama, nilai kebersamaan, maupun nilai keyakinan.

4. *Bonding Social Capital*

Bonding social capital yaitu ikatan modal sosial yang menunjukkan hubungan orang-orang dalam situasi yang mirip seperti keluarga dekat, kelompok etnik, kelompok keagamaan, teman dekat, dan tetangga. Pada penelitian ini berkaitan dengan hubungan antar masyarakatnya.

5. *Bridging Social Capital*

Bridging social capital yaitu ikatan modal sosial yang melibatkan hubungan diantara orang-orang yang tidak dekat dan berbeda. Bentuk ikatan tersebut seperti persahabatan yang tidak erat, dan rekan kerja. Pada penelitian ini berkaitan dengan hubungan antara masyarakat

dengan *stakeholder*.

6. Pengelolaan Pariwisata Berbasis Masyarakat

Garrod (dalam Achmad dan M. Kholid, 2016) menyatakan bahwa pengelolaan berbasis masyarakat (CBT) ini menjadikan masyarakat sebagai potensi yang harus dikembangkan dalam rangka memelihara sumber daya alam dan budaya untuk menjadi daya tarik wisata. Oleh karena itu, perlu adanya upaya memberdayakan masyarakat dengan mengikutsertakannya dalam setiap kegiatan yang ditujukan untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia dengan salah satunya menjadikan jejaring sebagai wadah pertukaran informasi mengenai kepariwisataan. Selain itu, pemerintah sebagai fasilitator dan pemangku kebijakan lainnya memberikan motivasi agar masyarakat bersedia berpartisipasi aktif dalam pembangunan pariwisata serta tidak membuat masyarakat setempat hanya merasa dimanfaatkan atau bahkan merasa terancam karena adanya pariwisata di daerahnya.

7. Peran Pekerja Sosial dengan Masyarakat

Community worker atau *community development worker* dalam *A Handbook for Community Development Workers* (2007) memiliki arti pekerja sosial makro memberikan informasi kepada anggota masyarakat dan membantu memberdayakan individu dan masyarakat. Salah satu peran utamanya adalah untuk membimbing dan mendukung anggota masyarakat yang bekerja di proyek berbasis masyarakat seperti proyek mengembangkan aset dan sumberdaya lokal dalam suatu masyarakat.

Peran pekerja sosial masyarakat dalam penelitian ini menurut Jim Ife (2014) terdiri atas peran teknis berupa melakukan pengumpulan dan analisis data, kemudian peran fasilitatif berupa memfasilitasi

pembentukan kelompok serta pemberian dukungan semangat. Selanjutnya peran representasional berupa mengembangkan jejaring kerja dan menghubungkan dengan sistem sumber, serta berikutnya peran edukasional berupa pemberian penyadaran dan pengetahuan misalnya dalam bentuk pelatihan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Lincoln dan Guba (dalam Moleong, 2017) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlatar alamiah, artinya peneliti sebagai instrumen kunci dalam penelitian yang terlibat dengan informan dan kenyataan-kenyataan di lapangan. Pendekatan kualitatif mampu mengemukakan fakta-fakta dan mengkaji secara mendalam mengenai suatu fokus penelitian, serta pencarian data bukan untuk membuktikan hipotesis.

Hal tersebut sesuai dengan alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini, yaitu bermaksud mengemukakan fakta-fakta mengenai bentuk dan kondisi modal sosial serta mengkaji secara mendalam mengenai setiap aspek dari fokus penelitian yang mengenai modal sosial masyarakat dalam pengelolaan pariwisata.

1. Deskriptif

Penelitian ini menggunakan model pendekatan deskriptif. Menurut Nazir (2009) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah metode yang digunakan dalam meneliti kelompok manusia, fenomena atau peristiwa pada masa sekarang. Kemudian data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka, serta hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dibandingkan generalisasi. Tujuannya yaitu untuk membuat tulisan secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta, sifat, dan hubungan

antara fenomena yang diteliti.

2. Sumber Data

Sumber data menurut Sugiyono (2017) terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, artinya sumber data yang diperoleh oleh peneliti didapatkan langsung dari informan.

Sementara itu sumber data primer pada penelitian ini selain dari wawancara yaitu dengan observasi partisipatif moderat pada aktivitas mata pencaharian penduduk dan aktivitas anggota pokdarwis dalam menjalankan tugas kerja.

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat dokumen. Sumber data ini diperoleh melalui studi dokumen yang dilakukan oleh peneliti.

3. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat dan memiliki kewenangan dalam pengelolaan pariwisata. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *sample*. Kemudian teknik pengambilan *sample* berupa *non-probability sampling* dengan jenis *Purposive*.

Menurut Sugiyono (2017) *non-probability sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel, dan yang dimaksud *purposive* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya pertimbangan bahwa orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang peneliti harapkan, atau orang tersebut merupakan penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan pada *natural setting* (kondisi alamiah) dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam (*in-depth-interview*), observasi partisipatif moderat, dan studi dokumen.

Menurut Esterberg (dalam Sugiyono, 2017) wawancara mendalam yaitu pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Menurut Sugiyono (2017) menjelaskan bahwa studi dokumentasi merupakan teknik pelengkap dari penggunaan teknik wawancara dan observasi dalam penelitian kualitatif. Peneliti melakukan studi dokumentasi dengan cara mempelajari dokumen, laporan ilmiah yang berkaitan dengan fokus penelitian, serta foto kegiatan penelitian.

Menurut Susan Stain back (dalam Sugiyono, 2017) menyatakan yang dimaksud observasi partisipatif moderat yakni peneliti dalam mengumpulkan data ikut dalam beberapa kegiatan, tetapi tidak semuanya artinya peneliti mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan fokus penelitian saja.

5. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2017) meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.

Uji kredibilitas merupakan pengujian kepercayaan terhadap data hasil penelitian, dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketukunan, serta triangulasi baik waktu, sumber, maupun teknik.

Uji keteralihan (*transferability*) dalam penelitian kualitatif adalah bagaimana membuat orang lain atau pembaca dapat memahami hasil penelitian, oleh karena itu menurut Sugiyono

(2017) peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya.

Uji kebergantungan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian, misalnya melalui kegiatan bimbingan.

Uji *confirmability* dilakukan dengan mengecek data dan informasi mengenai proses dan hasil dalam penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan Model Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2017) yaitu terdiri atas reduksi data, *display data* bisa dalam bentuk bagan maupun uraian singkat, serta kesimpulan atau verifikasi.

HASIL PENELITIAN

Hasil Penelitian memuat karakteristik informan, kondisi *bonding social capital* dan *bridging social capital* yang dirincikan dalam aspek modal sosial baik *trust*, *networks*, maupun *norms*. Kemudian disematkan hasil observasi untuk keabsahan data dalam penelitian ini.

1. Karakteristik Informan

Informan dalam penelitian ini berjumlah 6 (enam) orang yang terdiri atas masyarakat Kelurahan Muarareja dengan latar belakang dan status sosial yang berbeda. Pemilihan informan ini didasarkan pada kriteria informan yang telah disusun, pertimbangan lurah sebagai pemegang kekuasaan wilayah, serta persetujuan informan yang bersangkutan.

Informan tersebut dianggap dapat merepresentasikan kondisi modal sosial dalam pengelolaan pariwisata, dimana terdiri atas SW seorang pedagang di pantai yang juga sebagai perintis pokdarwis, kemudian HO

seorang warga masyarakat yang juga anggota kepengurusan pokdarwis periode pertama dan saat ini masih menjabat sebagai ketua RW di wilayah pantai berada.

Selanjutnya ZA merupakan seorang lurah yang juga menjadi pembina pokdarwis, kemudian KI merupakan seorang staff pemberdayaan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan administrasi pembentukan pokdarwis.

Kemudian RN merupakan ketua pokdarwis dan AB merupakan wakil ketua pokdarwis, dimana keduanya juga merupakan masyarakat asli Kelurahan Muarareja.

2. *Bonding Social Capital*

1) Rasa Saling Percaya (*Trust*)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya kesamaan pandangan berupa kesamaan harapan dan tujuan antar masyarakat untuk menjadikan pantai Muarareja Indah dengan konsep pariwisata yaitu untuk pelestarian pantai dan penanggulangan abrasi, mengatasi masalah sosial, dan menghidupkan kegiatan ekonomi. Seperti pernyataan Bapak SW “Iya. Jadi yang jelas dengan adanya wisata ini. Yang pertama kan satu merubah *mindset* (pola pikir) masyarakat, ya SDM lah ya. Yang kedua membuka lapangan kerja, yang ketiga bisa merawat lingkungan secara langsung ya. Jadi secara otomatis penghijauan yang ada di Muarareja ini bisa terjaga dan dilestarikan.” (wawancara dengan pedagang di pantai Muarareja Indah, 6 Januari 2020).

Berikutnya ditunjukkannya bentuk rasa saling percaya antar masyarakat salah satunya dengan keterlibatan suara (keputusan) untuk memberikan izin penggunaan konsep pariwisata pada pantai Muarareja Indah. Seperti pernyataan Bapak SW “Kalo secara keliling kita minta sumbangan engga, kita secara kelilingnya

minta izin mau jadiin pantai kita jadi wisata aja, dikasih izin aja bersyukur mba langsung gerak.” (wawancara dengan pedagang di pantai Muarareja Indah, 6 Januari 2020).

Selanjutnya ditunjukkan bentuk rasa saling percaya yang bertujuan melanggengkan hubungan yaitu adanya keterbukaan antara pokdarwis sebagai representatif pengelola pariwisata dengan warga masyarakat dan aparat kelurahan maupun *stakeholder* terkait transparansi dana baik pemasukan, penggunaan, maupun pengeluaran. Seperti pernyataan Bapak AB “Itu kalo itu [laporan pertanggungjawaban] yang diundang semua yang dateng seluruh anggota pokdarwis termasuk warung juga terus pembina juga kayak lurah Dinas Pariwisata, Polsek Tegal Barat, warga, terus ada wakil tokoh masyarakat. kita berusaha berorganisir dengan baik.” (wawancara dengan wakil ketua pokdarwis Muarareja Indah, 7 Januari 2020).

2) Jejaring atau Jaringan (*Norms*)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum adanya pertukaran pengetahuan yang terencana dan teragenda antar masyarakatnya termasuk antar pokdarwis dengan warga dan aparat kelurahan. Akibatnya masyarakat masih belum mengetahui sapa pesona pariwisata dan memanfaatkan peluang dan peran dalam kawasan pariwisata. Seperti pernyataan Bapak SW “Bahkan waktu itu masyarakat belum ada yang tahu apa itu pokdarwis. Ya termasuk sekarang ketuanya Mas RN dulunya belum paham.” (wawancara dengan pedagang di pantai Muarareja Indah, 6 Januari

2020).

Di sisi lain, jejaring yang terbentuk antar masyarakat untuk mengelola pariwisata menunjukkan adanya hubungan timbal balik yang saling menguntungkan diantaranya adalah adanya bentuk tanggung jawab sosial dari diterapkannya konsep pariwisata kepada masyarakat yang sebelumnya telah terlibat dalam pemberian izin. Tanggung jawab sosial tersebut sebagai bentuk balasan berbentuk *reward* kepada masyarakat. Seperti pernyataan Bapak HO “[bantuan sosial] Ada oh, itu sih tadi seperti dana sosial untuk dana kematian untuk masyarakat Muarareja, terus hari keagamaan islam, terus hari-hari besar seperti tujuhbelasan (hari Kemerdekaan RI). Terus ada santunan untuk orang-orang jompo. Ya tadi dari masyarakat untuk dan oleh masyarakat.” (wawancara dengan Ketua RW II Kelurahan Muarareja, 6 Januari 2020).

3) Nilai atau Norma (*Norms*)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai atau norma yang terjalin antar masyarakat Kelurahan Muarareja dipengaruhi oleh nilai-nilai masyarakat Jawa Pesisir dan nilai agama Islam sebagai agama mayoritas. Nilai yang ada bersifat mengikat dan menerapkan ganjaran (*reward*) dan sanksi baik hukum maupun sosial.

Berikutnya nilai yang ada dalam hubungan kerjasama untuk pengelolaan pariwisata bersifat melembaga, salah satunya dibuktikan akan ketaatan masyarakatnya terhadap nilai yang telah disepakati bersama dalam bentuk tata tertib. Seperti pernyataan Bapak AB “Kayak misalnya pokoknya tutup jam 6 sore, termasuk pas tahun baru. Karena kita

sesuai tata tertib dan keinginan serta kesepakatan dengan masyarakat.” (wawancara dengan wakil ketua pokdarwis Muarareja Indah, 7 Januari 2020).

3. *Bridging Social Capital*

1) Rasa Saling Percaya (*Trust*)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya kesamaan pandangan antara kebutuhan masyarakat dengan program *stakeholder* dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka majunya pariwisata. Seperti pernyataan Bapak HO “penanaman penghijauan mangrove sepanjang pantai (2 km) itu per-pertak dengan ukuran 4x6, itu pohonnya di dapat dari DLH yang katanya juga mba untuk program konservasi gitu.” (wawancara dengan Ketua RW II Kelurahan Muarareja, 6 Januari 2020).

Berikutnya bentuk rasa saling percaya antara masyarakat dengan Dinas Lingkungan Hidup adalah keterlibatan masyarakat untuk melakukan penanaman pohon yang diberikan oleh DLH. Seperti pernyataan Bapak RN “Bapak saya dan masyarakat yang peduli tadi dapat perintah dari DLH untuk menanami cemara, dari ujung barat sampai sepanjang pantai 2 km ke ujung timur.” (wawancara dengan ketua pokdarwis Muarareja indah, 7 Januari 2020).

2) Jaringan atau Jejaring (*Networks*)

Hasil penelitian menunjukkan belum adanya pertukaran pengetahuan yang terencana dan teragendakan dalam jejaring antara masyarakat dengan *stakeholder* yang berwenang khususnya Dinas Pariwisata. Seperti pernyataan Bapak RN “Kalo Dispar tah (itu) juga fokusnya ke pelatihan atau *study banding*

mba, seperti kemarin itu di Klaten saya ikut untuk pelatihan dan ketemu teman-teman pokdarwis se-Jawa Tengah, tapi cuma saya saja, nah ini yang saya harapkan agar merata begitu dapat pengetahuan pariwisatanya.” (wawancara dengan ketua pokdarwis Muarareja indah, 7 Januari 2020).

Di sisi lain adanya hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara masyarakat dengan *stakeholder* lain yaitu PT. Pacific Paint, dimana masyarakat diuntungkan karena mendapat bantuan untuk keindahan pantai yang berdampak pada kenaikan jumlah pengunjung dan pendapatan, sementara PT. Pacific Paint diuntungkan dengan mendapat penghargaan *Best CSR Program*.

3) Nilai atau Norma (*Norms*)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai yang terjalin antara masyarakat dengan *stakeholder* berupa nilai kerjasama dalam bentuk kesepakatan yang bertujuan saling menguntungkan. Nilai yang ada berifat mengikat dan menerapkan ganjaran (*reward*) dan sanksi baik hukum maupun sosial seperti pemutusan hubungan kerjasama dalam bentuk pemberhentian pemberian bantuan atau tidak menjadi sasaran program *stakeholder* lagi.

4. Hasil Observasi

Observasi dilakukan menggunakan teknik observasi partisipatif moderat dilaksanakan pada kegiatan mayoritas mata pencaharian masyarakat saat bekerja dan kegiatan anggota pokdarwis saat bekerja. Peneliti melakukan pengamatan terhadap kegiatan mereka dari jauh, serta berbincang sederhana kepada mereka.

Hasil observasi menunjukkan bahwa

dalam bekerja baik antar nelayan atau antar tani tambak, atau antar pedagang prinsipnya saling membantu dan bekerjasama. Serta untuk nelayan dan tani tambak pembagian upah masih sama rata belum ada pembagian berdasarkan beban tugas kerja. Hal ini yang melanggengkan rasa saling percaya antar masyarakatnya.

Kemudian hasil observasi anggota pokdarwis dalam bekerja menunjukkan saling membantu dan kooperatif dengan tetap bekerja meskipun tidak diawasi langsung. Hal ini pula yang melembagakan nilai kerjasama yang terjalin antar masyarakatnya.

5. Kondisi Modal Sosial Masyarakat dalam Pengelolaan Pariwisata

Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal sosial masyarakat dalam pengelolaan pariwisata untuk *bonding social capital* (antar masyarakat) bersifat lemah, karena jejaring yang terjalin belum menjalankan fungsi pertukaran pengetahuan terkait peran dan potensi masyarakat dalam kawasan pariwisata.

Kemudian modal sosial masyarakat untuk *bridging social capital* (antara masyarakat dengan *stakeholder*) masih berjalan sporadis, karena jejaring yang terjalin belum dimaksimalkan untuk melaksanakan fungsi pertukaran pengetahuan misalnya dalam bentuk pelatihan kepariwisataan maupun peningkatan kolaborasi dalam pengelolaan pariwisata.

PEMBAHASAN

1. Pembahasan *Bonding Social Capital* dengan Kajian Teoritis

Rasa saling percaya dalam *bonding social capital* bersifat mendukung, hal tersebut ditunjukkan dengan adanya kesamaan harapan dan tujuan masyarakat akan penerapan konsep pariwisata, kemudian

dilanjutkan dengan keinginan masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan pariwisata salah satunya terlibat dalam memberikan suara (keputusan) berupa izin. Hal ini sejalan dengan konsep Coleman (1989) yang menyatakan bahwa hubungan kerjasama dapat terjalin apabila adanya *trust* yang muncul karena adanya kesamaan pandangan dan keinginan individu untuk terlibat. Selain itu hasil penelitian juga afirmatif dengan konsep Fukuyama (2002) mengenai bentuk rasa saling percaya untuk melanggengkan hubungan adalah perilaku jujur yang ditunjukkan dengan keterbukaan pada transparansi dana pengelolaan pariwisata.

Jejaring atau jaringan dalam *bonding social capital* dikatakan lemah, hal tersebut ditunjukkan dengan belum adanya pertukaran pengetahuan antar masyarakatnya sehingga masyarakat belum mengetahui peran dan potensi dalam kawasan pariwisata. Hal tersebut kontradiktif dengan Fukuyama (2002) yang menyatakan bahwa suatu jaringan efektif menjadi wadah pertukaran informasi atau pengetahuan. Sementara untuk hubungan timbal balik bersifat saling menguntungkan, namun tetap saja jika dalam jejaring terdapat aspek yang tidak dipenuhi, maka pemanfaatan jejaring tersebut menjadi kurang optimal.

Nilai atau norma dalam *bonding social capital* bersifat melembaga sehingga jejaring yang terjalin tetap ada, hal ini ditunjukkan dengan antar masyarakat saling menghargai yang ditunjukkan dengan perilaku taat pada nilai yang menjadi pedoman berperilaku maupun nilai kerjasama seperti dalam bentuk tata tertib. Hal ini selaras dengan Putnam (2000) yang menyatakan bahwa nilai merupakan suatu kewajiban atau obligasi sehingga jika tidak ditaati berdampak pada menurunnya *trust* (*distrust*) kemudian menurunnya partisipasi dan berdampak pada

hilangnya jaringan.

Secara keseluruhan *bonding social capital* antar masyarakat bersifat lemah karena belum adanya pertukaran pengetahuan dalam jejaring yang terjalin antar masyarakat dalam pengelolaan pariwisata. Hal ini sejalan dengan Putnam (2000) bahwa apabila modal sosial sering digunakan maka semakin optimal, sehingga bersifat lemah bukan karena sering digunakan melainkan karena belum optimal dimanfaatkannya.

Selaras dengan Fukuyama (2002) yang mengatakan bahwa modal sosial dikatakan berkembang jika di dalam jejaringnya terdapat pertukaran pengetahuan yang tumbuh dan berkembang.

Hal ini membuktikan bahwa pertukaran pengetahuan memiliki peran penting dalam menentukan kondisi modal sosial. Oleh karena itu, kesimpulan *bonding social capital* dikatakan lemah karena belum adanya pertukaran pengetahuan dikatakan sesuai.

2. Pembahasan *Bridging Social Capital* dengan Kajian Teoritis

Rasa saling percaya dalam *bridging social capital* bersifat mendukung, hal tersebut ditunjukkan dengan adanya kesamaan pandangan yang ditunjukkan dengan adanya kesamaan kebutuhan masyarakat dengan program *stakeholder*. Kemudian dilanjutkan adanya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata diantaranya terlibat dalam memberikan tenaga berupa menanam pohon mangrove. Hal ini sejalan dengan konsep Coleman (1989) menyatakan bahwa hubungan kerjasama dapat terjalin apabila adanya *trust* yang muncul karena adanya kesamaan pandangan dan keinginan untuk terlibat. Selain itu hasil penelitian juga afirmatif dengan konsep Fukuyama (2002) mengenai bentuk rasa saling percaya untuk

melanggengkan hubungan adalah perilaku jujur yang ditunjukkan dengan keterbukaan pada transparansi dana pengelolaan pariwisata.

Jejaring atau jaringan dalam *bridging social capital* masih berjalan sporadis, artinya hubungan yang terjalin masih bersifat kadang-kadang belum teragendakan dan terencana secara matang. Serta kegiatannya masih seputar kegiatan itu-itu saja dan bersifat pengulangan. Sehingga belum maksimalnya peran jejaring karena belum adanya kegiatan pertukaran pengetahuan atau bentuk kolaborasi. Hal tersebut kontradiktif dengan Nan Lin (2009) yang mengatakan bahwa peran *bridging social capital* adalah memberikan keuntungan dan manfaat pada anggota di dalam jejaring (mengatasi masalah masyarakat).

Nilai atau norma dalam *bridging social capital* bersifat melembaga sehingga jejaring yang terjalin tetap ada, hal ini ditunjukkan dengan saling memberikan keuntungan antara masyarakat dengan *stakeholder* dalam menjalin hubungan kerjasama sehingga memunculkan nilai keyakinan untuk meneruskan hubungan. Hal ini afirmatif dengan Putnam (2000) yang menyatakan bahwa nilai merupakan suatu kewajiban atau obligasi sehingga jika tidak ditaati berdampak pada menurunnya *trust (distrust)* kemudian menurunnya partisipasi dan berdampak pada hilangnya jaringan.

Secara keseluruhan *bridging social capital* masih berjalan sporadis, karena belum adanya pertukaran pengetahuan antara masyarakat dan *stakeholder* secara terencana dan teragendakan serta minimnya kolaborasi dalam pengelolaan pariwisata. Sehingga *bridging social capital* berjalan sporadis dan belum berkembang.

Hal ini selaras dengan Fukuyama (2002) yang mengatakan bahwa jika belum

memaksimalkan peran pihak di luar masyarakat untuk mengatasi masalah di dalam masyarakatnya, maka modal sosial tersebut dikatakan belum berkembang.

3. Analisis Masalah

Masalah yang dialami oleh masyarakat Kelurahan Muarareja dalam pengelolaan pariwisata pantai Muarareja Indah yaitu lemahnya *bonding social capital* dan kurang maksimalnya peran *bridging social capital* dalam pengelolaan pariwisata. Masalah tersebut diperoleh berdasarkan fakta dominan masalah dan gejala masalah sebagai berikut:

1. Fakta Dominan Masalah

- a. Lemahnya hubungan interaksi saling memberikan informasi maupun pengetahuan antar masyarakat mengenai pengelolaan pariwisata;
- b. Interaksi hubungan antara masyarakat dengan *stakeholder* yang masih berjalan sporadis.

2. Gejala Masalah

- a. Gejala masalah dari lemahnya hubungan interaksi saling memberikan informasi maupun pengetahuan antar masyarakat mengenai pengelolaan pariwisata yaitu (1) warga masyarakat belum memiliki pengetahuan menyeluruh mengenai peran warga masyarakat dalam kawasan pariwisata. (2) pemerintah kelurahan belum memiliki pengetahuan menyeluruh mengenai peran pemerintah kelurahan dalam rangka mendukung pengelolaan pariwisata; (3) kelompok sadar wisata belum memiliki pengetahuan menyeluruh mengenai konsep sapa pesona pariwisata dan peran pramuwisata; (4) pedagang belum memiliki pengetahuan mengenai konsep berdagang di kawasan

pariwisata.

- b. Gejala masalah dari interaksi hubungan antara masyarakat dengan *stakeholder* masih berjalan sporadis yaitu (1) belum adanya pertukaran informasi atau pengetahuan yang terarah antar masyarakat; (2) belum adanya kolaborasi pengelolaan pariwisata secara langsung dengan pokdarwis lain; (3) belum adanya perkembangan kerjasama dengan perusahaan untuk perkembangan pariwisata.

4. Analisis Kebutuhan

Hasil analisis kebutuhan dijabarkan dalam gambar tabel berikut.

Kondisi Faktual *	Kondisi Ideal	Kebutuhan **
Lemahnya <i>bonding social capital</i> dan kurang optimalnya <i>bridging social capital</i> masyarakat dalam pengelolaan pariwisata ditandai dengan: 1. Lemahnya hubungan interaksi saling memberikan informasi maupun pengetahuan antar masyarakat mengenai pengelolaan pariwisata; 2. Interaksi hubungan antara masyarakat dengan <i>stakeholder</i> masih berjalan sporadis.	Kuatnya <i>bonding social capital</i> dan optimalnya <i>bridging social capital</i> masyarakat dalam pengelolaan pariwisata ditandai dengan: 1. Kuatnya hubungan interaksi saling memberikan informasi maupun pengetahuan antar masyarakat mengenai pengelolaan pariwisata; 2. Interaksi hubungan antara masyarakat dengan <i>stakeholder</i> berjalan maksimal.	Dioptimalkan atau dimaksimalkan modal sosial berupa <i>bridging social capital</i> untuk memeperkuat <i>bonding social capital</i> .

Gambar 1: Analisis Kebutuhan

Analisis kebutuhan di atas mengacu pada konsep Fukuyama (2002) yang mengatakan bahwa “ketika modal sosial dalam sebuah masyarakat tertentu melemah, maka dapat digerakkan ke arah kegiatan yang melibatkan aktor-aktor lain di luar masyarakatnya. Atau modal sosial yang semula bersifat *bonding social capital* digeser ke arah *bridging social capital*.” Hal ini sejalan pula dengan konsep Putnam (2000) yang mengatakan bahwa “lemahnya modal sosial, bukan karena sering dipakai, melainkan karena modal sosial tidak dipergunakan secara maksimal”.

Pemaksimalan peran *bridging social capital* dalam hal ini adalah memaksimalkan

peran *stakeholder* yang berwenang memberikan pengetahuan atau informasi mengenai kepariwisataan dan sapta pesona pariwisata, dimana *stakeholder* ini melakukan pertukaran informasi atau pengetahuan dengan masyarakat menggunakan teknik tertentu yang bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat.

Tidak hanya itu, *stakeholder* disini juga wajib memaksimalkan perannya sebagai Pembina dalam struktur kepengurusan pokdarwis dengan mengawasi pengelolaan pariwisata serta menjadi *broker* yang menampung masalah dan kebutuhan untuk nantinya disampaikan kepada Pemerintah Kota dan sistem sumber lain. Setelah masyarakat memiliki jejaring yang berisi pertukaran pengetahuan dengan *stakeholder*, maka masyarakat dikatakan memiliki pengetahuan dasar untuk nantinya membangun jejaring yang berisi pertukaran pengetahuan dengan masyarakat lainnya yang belum tergabung dalam jejaring sebelumnya dengan cara memanfaatkan kelompok sadar wisata yang ada untuk membentuk divisi-divisi yang diperlukan dalam rangka peningkatan peran masyarakat di kawasan potensi pariwisata (hasil dari pertukaran pengetahuan dengan *stakeholder* tadi), dimana divisi tersebut nantinya bertanggungjawab untuk menciptakan jejaring antar masyarakat untuk nantinya memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas mengenai peran masyarakat di kawasan potensi pariwisata, divisi ini dalam pelaksanaannya dibimbing oleh pendamping yang berasal dari Dinas Pariwisata untuk menciptakan kolaborasi hubungan.

Lalu, dikarenakan sudah adanya pemaksimalan peran *stakeholder* dalam jejaring dengan masyarakat dan adanya interaksi pertukaran informasi antar sesama

masyarakat, maka akan berdampak pada menguatnya *bonding social capital* masyarakat dalam pengelolaan pariwisata.

5. Analisis Sistem Sumber

Sistem sumber menurut Allen Pincus dan Anne Minahan (dalam Suradi, 2007) yang mengkategorisasikan sistem sumber menjadi tiga yaitu sistem sumber informal, sistem sumber formal, dan sistem sumber kemasyarakatan. Berikut penjabarannya:

1) Sistem Sumber Informal

Sistem sumber yang akan dioptimalkan diantaranya meliputi keluarga, tetangga, warga masyarakat Kelurahan Muarareja, pokdarwis Muarareja Indah, tokoh masyarakat, dan sistem sumber informal lainnya yang dianggap dapat memperkuat modal sosial *bonding social capital* dan memaksimalkan pemanfaatan *bridging social capital* dalam pengelolaan pariwisata.

2) Sistem Sumber Formal

Sistem sumber formal yang akan dioptimalkan diantaranya meliputi Dinas Olahraga Pemuda Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tegal, Pemerintah, Perusahaan, dan dinas-dinas terkait serta sistem sumber formal lainnya yang dianggap dapat memperkuat modal sosial *bonding social capital* dan memaksimalkan pemanfaatan *bridging social capital* dalam pengelolaan pariwisata.

3) Sistem Sumber Kemasyarakatan

Sistem sumber kemasyarakatan yang akan dioptimalkan diantaranya meliputi program dan pelayanan dari pemerintah yang dianggap dapat mendukung upaya memperkuat modal sosial *bonding social capital* dan memaksimalkan pemanfaatan *bridging social capital* dalam pengelolaan pariwisata.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal sosial antar masyarakat atau *bonding social capital* bersifat lemah, hal ini karena fungsi pertukaran pengetahuan antar masyarakat berkaitan dengan informasi peran dan potensi masyarakat dalam kawasan pariwisata belum terlaksana secara terencana dan teragenda, sehingga dapat berdampak masyarakat mengalami hambatan *poor training* yang nantinya lebih lanjut menyebabkan lambatnya pengelolaan pariwisata.

Berikutnya hasil penelitian modal sosial antara masyarakat dengan *stakeholder* berjalan sporadis, artinya belum adanya pertukaran pengetahuan misalnya dalam bentuk pelatihan kepariwisataan untuk masyarakat serta minimnya kolaborasi *stakeholder* dengan masyarakat. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian mengenai *bonding social capital* yaitu karena tidak maksimalnya jejaring dengan *stakeholder* berdampak pada belum berfungsi secara efektif dan optimalnya jejaring di dalam masyarakat. Sehingga solusinya perlu memaksimalkan peran *stakeholder* dengan masyarakat dalam jaringan kerjasama, kemudian penciptaan kolaborasi antar keduanya dalam jaringan tersebut yang nantinya berdampak pada berjalannya fungsi jejaring antar masyarakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Nur Yachya dan M. Khoid Marwardi. (2016). *Pengelolaan Kawasan Wisata Sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Berbasis CBT (Community Based Tourism) Studi pada Kawasan Wisata Pantai Clungup Kabupaten Malang*. Vol 39. No 2. Hal 107-115.
- Babael, Hamidreza, et al. (2012). *Bonding Bridging and Linking Social Capital and Empowerment Among Squatter Settlements in Tehran, Iran World Applied Sciences Journal*. Vol. 17. 1818-4952. Hal 119-126.
- Field John. 2010. *Modal Sosial [terj]. Bantul : Kreasi Wacana*.
- Fukuyama, Francis. (2002). *Trust: Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran [terj]* Rusiani. Yogyakarta: Qalam.
- Hawkins, Robert. L, Katherine Maurer. (2009). *Bonding, Bridging, and Linking : How Social Capital Operated in New Orleans following Hurricane Kathrina. British Journal of Social Work*. Vol 40. 1779-1780.
- Idrus Ruslan. (2014). *Religiositas Masyarakat Pesisir (Studi Atas Tradisi Sedekah Laut Masyarakat Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Wara Kota Bandar Lampung)*. Vol 9. No 2. Hal 63-67.
- Ife, Jim dan Frank Tesoriero. (2014). *Community Development (Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi)[terj]* Sastrawan Manullang, Nurul Yakin, M. Nursyahid. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Lexy J Moleong. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Ministry for Public Service CDW. (2007). *A Handbook for Community Workers. Community Development Programme*.
- Moh. Nazir. (2009). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghaia Indonesia.
- Robert M.Z Lawang. (2005). *Kapital Sosial dalam Perspektif Sosiologik*. Jakarta : FISIP UI PRESS.
- Putnam, Robert. (2000). *Bowling Alone: The*

- Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon and Schurster.
- Rudy Rapang. (2013). *Modal Sosial dalam Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan (Studi Tentang Proses Terbentuknya Modal Sosial Kelompok Pemerhati Anak dan Perempuan Crisis Centre Cahaya Mentari) di Kecamatan Sawahan Surabaya dalam Perspektif Teori Pertukaran Sosial*. Thesis Universitas Airlangga.
- Rusydan Fathy. (2019). *Modal Sosial: Inklusivitas dan Pemberdayaan Masyarakat*. Vol 6. No 1. Hal 1-16.
- Rusydi Syahra. (2003). *Modal Sosial: Konsep dan Apikasi Jurnal Masyarakat dan Budaya*. Vol 5. No 1. Hal 1-22.
- Sugiyono. (2017). *Cara Mudah Menyusun: Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Bandung : ALFABETA.
- Suradi. (2007). *Membangun dan Memberdayakan Masyarakat*. Vol 12. No 2. Hal 22.
- Sunyoto Usman. (2018). *Modal Sosial*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta.
- Suryo Sakti Handiwijoyo. (2012). *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Warren Mark A,dkk. *Social Capital and Poor Communities*. Russell Sage Foundation : New York.
- Wustari L.H. (2015). *Diagnosing Indonesian Organization Using Blockage Organization Inventory*. Hal 16-17.
- Yudhistira Dwi Putra. (2017). *Okezone News : Jalasveva Jayamahe, Hikayat Kejayaan Laut Nusantara Masa Kini*. Diakses dari : www.okezone.com/amp/2017/11/03/jalesveva-jayamahe-hikayat-kejayaan-laut-nusantara-masa-kini-

Internet

- Admin. (2018). *Data Kementerian Pariwisata*. Diakses dari Indonesia.go.id/ragam/pariwisata/pariwisata/wisata-indonesia-di-mata-dunia